

KEMENDIKBUD BERI KERINGANAN Mahasiswa Terdampak Pandemi Covid-19

JAKARTA (KR) - Pemerintah melalui Kemendikbud terus berupaya memberikan dukungan secara maksimal kepada mahasiswa agar tetap bisa kuliah dengan baik di masa Covid-19. Melalui Permendikbud No 25 Tahun 2020, Kemendikbud memberikan berbagai skema dukungan bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) terdampak pandemi.

"Bagi mahasiswa yang menghadapi kendala finansial selama pandemi Covid-19 dapat mengajukan keringanan UKT kepada perguruan tinggi. Kemendikbud mengapresiasi kesepakatan Majelis Rektor PTN yang telah bergerak bersama, bergotong royong meringankan beban adik-adik mahasiswa," kata Mendikbud Nadiem Anwar Makarim di Jakarta, Jumat (3/7).

Pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa terdampak pandemi. Selain itu, mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil SKS sama sekali, misalnya sedang menunggu kelulusan.

Kemudian, mahasiswa di masa akhir kuliah dapat membayar paling tinggi 50% UKT jika mengambil =6 SKS. Hal ini berlaku bagi semester 9 bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan (S-1, D-4) dan semester 7 bagi mahasiswa program diploma tiga (D-3). "Ini merupakan bukti, kita mendengar dan berupaya mengurangi beban mahasiswa yang terdampak krisis Covid-19 ini. Kerangka regulasi ini kita berikan agar semua perguruan tinggi negeri bisa segera melakukan keringanan UKT untuk membantu mahasiswanya yang terdampak," tutur Nadiem.

Kemendikbud juga memberikan bantuan UKT atau biaya perkuliahan kepada 410 ribu mahasiswa 3, 5 dan 7 kepada PTN dan PTS dengan menggunakan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. "Mulai hari ini kuota masing-masing perguruan tinggi sudah dibagikan. Bantuan ini akan diberikan dengan proporsi 60% dialokasikan ke perguruan tinggi swasta, dan 40% dialokasikan ke PTN," jelas Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud Ainun Na'im.

Untuk itu, Sesjen Kemendikbud mengimbau PTN dan PTS segera melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang membutuhkan bantuan UKT ini. Kemudian mengusulkan kepada Kemendikbud agar mahasiswa tersebut dapat memperoleh kepastian pembayaran UKT pada semester gasal tahun ini.

Lebih lanjut, Ainun menjelaskan, program KIP Kuliah tetap akan diberikan kepada 200 ribu mahasiswa baru tahun 2019. Sedangkan mahasiswa Bidikmisi *on going* tetap dijamin pembiayaannya oleh pemerintah sampai selesai studinya. Demikian juga alokasi anggaran untuk Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk Papua dan Papua Barat. **(Ati)-o**

KELUARKAN TIGA SURAT EDARAN Rektorat UIN Respons Permintaan Mahasiswa

YOGYA (KR) - Jajaran Rektorat UIN Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta bergerak cepat merespons tuntutan Aliansi Mahasiswa UIN Suka terkait keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan mengeluarkan tiga surat edaran (SE) sekaligus.

"SE tersebut sebagai tindak lanjut kesepakatan dengan mahasiswa," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr Phil Sahiron MA, Jumat (3/7).

Ketiga SE yang juga ditembuskan ke Menteri Agama tersebut, yakni SE No 1811.2 Tahun 2020 tentang Penundaan dan Pengangsuran/Penyicilan Pembayaran UKT/SPP Mahasiswa Semester

Ganjil TA 2020/2021, SE No 1811.3 Tahun 2020 tentang Keringanan UKT untuk Mahasiswa S1 Semester Akhir TA 2020/2021 dan SE No 1811.4 Tahun 2020 tentang Keringanan SPP untuk Mahasiswa Pascasarjana Semester Akhir TA 2020/2021.

"Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan dispensasi kepada seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam pem-

bayaran UKT/SPP semester ganjil TA 2020/2021 dengan cara mengangsur/mencicil sampai 30 Oktober 2020. Mahasiswa yang akan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur/mencicil diharuskan mengisi *form* yang sudah disediakan dan melampirkan surat pernyataan kesanggupan pembayaran bermaterai," kata Dr Sahiron.

Sedangkan dalam SE yang lain juga disebutkan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan dispensasi keringanan pembayaran UKT bagi mahasiswa S1 semester akhir sebesar 50 persen dengan ketentuan mahasiswa mengajukan surat dispensasi kepada Rektor dilampiri KRS se-

mester genap yang mencantumkan pengambilan skripsi serta surat permohonan discan berwarna dan dikirim kepada Plt Rektor melalui email keuangan@uin-suka.ac.id.

Sementara itu Dr Sahiron juga menjelaskan, memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat di era pandemi Covid-19, pihaknya memberikan dispensasi keringanan 50 persen dari SPP yang dibayarkann untuk semester gasal tahun 2020/2021 bagi mahasiswa S2 tahun ajaran 2016 dan S3 tahun ajaran 2013 yang sedang menulis tesis (S2) atau disertasi (S3) dan menyelesaikannya di tanggal 31 Januari 2021 dengan ketentuan yang sudah diatur. **(Feb)-o**

SD Muhammadiyah Kauman Siap Hadapi 'New Normal'



KR-Istimewa

SD Muhammadiyah Kauman.

YOGYA (KR) - Menjelang pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran baru 2020/2021, SD Muhammadiyah Kauman Yogya telah mempersiapkan diri memasuki pembelajaran era new normal. Sejumlah upaya dilakukan sekolah, antara

lain diadakan *workshop* manajemen pembelajaran jarak jauh (*daring*) menghadirkan pakar dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Dr Wuri Wuryandani MPd. Selqain itu, saat Penge-

nalan Lingkungan Sekolah (PLS) kepada peserta didik baru, SD Muhammadiyah Kauman melaksanakan secara virtual. "Ini dalam rangka menerapkan *social distancing* sekaligus untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan SD Muhammadiyah Kauman," terang guru SD Muhammadiyah Kauman, Agung Rahmanto SH MPd, Jumat (3/7). Agung menjelaskan kegiatan pembelajaran di lingkungan SD Muhammadiyah Kauman di tahun ajaran baru 2020/ 2021 menggunakan model pembelajaran *blended learning*. Dalam pembelajaran itu, juga dilakukan *cognitive assesment* untuk mengetahui kemampuan peserta didik baru. **(Dev)-o**

HASIL PPDB DIUMUMKAN LEWAT ONLINE Sekolah Juga Gunakan Model 'Drive Thru'

YOGYA (KR) - Meski sejumlah SMA/SMK Negeri di DIY sudah memutuskan untuk mengumumkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online, namun untuk mengetahui persyaratan daftar ulang dan memastikan anaknya benar-benar diterima, sejumlah orangtua memutuskan untuk tetap datang ke sekolah. Menyikapi kondisi tersebut, sekolah menerapkan sejumlah strategi mulai dari mewajibkan mereka untuk menaati protokol kesehatan sampai menerapkan model *drive-thru* untuk menghindari terjadinya kerumunan.

"Sebetulnya pengumuman hasil seleksi sudah kami sampaikan secara online. Namun untuk mengetahui persyaratan pendaftaran ulang, orangtua dan siswa lebih memilih datang langsung ke sekolah," kata Ketua PPDB SMK Negeri 2 Yogyakarta, Arif Sujatmiko, Jumat (3/7).

Model *drive-thru* jelasnya. begitu masuk pintu gerbang, orangtua atau siswa langsung diukur suhunya dan diberi selebaran berisi syarat-syarat untuk daftar ulang. Proses daftar ulang di SMKN 2 sesuai dengan kesepakatan baru dimulai Senin (6/7) mendatang. Karena daya tampung di SMK 2 Yogyakarta ada 880 orang, pelaksanaan daftar ulang dibagi dalam berbagai shift.

Komentar senada diungkapkan Kepala SMAN 9 Yogyakarta, Drs Jumadi MSi. Menurutny, meski hasil seleksi PPDB sudah diumumkan via online, namun beberapa orangtua tetap datang ke sekolah untuk melihat hasil seleksi secara langsung. Konsekuensinya, orangtua dan siswa baru yang datang harus menjalani pemeriksaan suhu dan protokol kesehatan secara ketat. **(Ria)-o**

EKONOMI

SWI Tangani 2.591 Fintech Ilegal

JAKARTA (KR) - Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan, jumlah total fintech peer to peer lending ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 hingga Juni 2020 sebanyak 2.591 entitas. Sementara Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam tugasnya melakukan pencegahan tindakan pada Juni, menemukan 105 fintech peer to peer lending ilegal yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam.

"Maraknya fintech peer to peer lending ilegal itu sengaja memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid 19. Pada bulan Juni ini, sebanyak 105 fintech peer to peer lending ilegal itu tidak terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan otoritas perizinan, pengaturan dan pengawasan layanan fintech peer to peer lending," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Jumat (3/7).

Dikatakan, mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman pendek dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone. **(Lmg)-o**

HSBC Indonesia Sumbang APD

JAKARTA (KR) - PT Bank HSBC Indonesia (HSBC Indonesia) bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menyalurkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas medis di beberapa daerah. Terutama di Jakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Menurut Head of Corporate Sustainability PT Bank HSBC Indonesia Nuni Sutuyo, HSBC memahami bahwa pelanggaran PSBB diperlukan untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Namun perlu membangun kepedulian masyarakat untuk dapat menjaga standar sanitasi dan kebersihan yang tinggi. Mengingat dengan masyarakat yang sehat, dapat membangun perekonomian secara lebih berkelanjutan. "Untuk itu kami sangat menghargai inisiatif PMI membantu menyediakan bantuan berupa APD dan menjangkau para tenaga medis yang masih sangat membutuhkan," terangnya di Jakarta, Jumat (3/7).

Sementara Sekjen PMI Sudirman Said menjelaskan, meski PSBB telah dilonggarkan, perjuangan melawan Covid-19 masih panjang. PMI melihat adanya potensi risiko dengan mulai dibukanya ruang-ruang publik seperti mal, taman, bahkan sekolah.

"Kurva kenaikan penderita Covid-19 di Indonesia belum melandai. Sedikit kelalaian sangat berisiko menimbulkan kenaikan angka kasus positif yang menyebabkan gelombang kedua serangan virus Korona," terangnya. **(Aha)-o**

PEMERINTAH HARUS PERCEPAT PENYALURAN STIMULUS

Restrukturisasi Kredit UMKM Tembus Rp 500 T

JAKARTA (KR) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, tekanan terhadap Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat besar. Terbukti, banyak pengusaha yang akhirnya mengajukan restrukturisasi kredit lantaran bisnisnya terdampak Covid-19.

"Total restrukturisasi kredit yang diajukan UMKM sudah lebih dari Rp 500 triliun. Angka tersebut sudah sekitar 50 persen dari Rp 1.100 triliun total pinjaman yang disalurkan kepada pengusaha UMKM," ungkap Rosan Perkasa Roeslani usai bertemu dengan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, kemarin.

Sedangkan total keseluruhan pengajuan restrukturisasi dari

dunia usaha kepada perbankan sudah mencapai lebih dari Rp 1.350 triliun atau 25 persen dari lending perbankan. Dari angka tersebut, lebih dari Rp 695 triliun sudah disetujui. "Dalam waktu singkat, tekanan terhadap UMKM Ini sangat besar," kata Rosan.

Rosan juga memperkirakan pengajuan restrukturisasi kredit ke perbankan bisa melonjak mencapai Rp 2.500 - Rp 2.800 triliun pada akhir tahun ini apa-

bila pemerintah tidak mempercepat penyaluran stimulus kepada dunia usaha. "Kalau tidak ada langkah konkret dan implementasi masih lambat, saya memperkirakan angka pengajuan restrukturisasi akan berkembang menjadi level 40-45 persen dari total lending perbankan yang saat ini di level Rp 5.700 triliun pada bulan Desember ini," katanya .

Rosan juga mengatakan, proses restrukturisasi sudah berjalan. Masih ada lanjutan yang dibutuhkan yakni kredit modal kerja untuk UMKM dan dunia usaha. Kalau dilihat dari likuiditas, bank khususnya bank buku 4 masih dalam kondisi baik, mungkin yang sudah mulai

mengalami masalah adalah bank yang lebih kecil.

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiana mengatakan, Rp 685,45 triliun kredit perbankan sudah direstrukturisasi hingga 22 Juni 2020. Nilai tersebut terdiri dari Rp 307,8 triliun untuk sektor UMKM dan Rp 387,52 triliun untuk non-UMKM.

Sementara Ketua Umum APINDO Hariyadi BS Sukamdani mengatakan, pada saat ini yang paling krusial adalah bagaimana menumbuhkan permintaan. Berapa pun stimulus yang diberikan, kalau masyarakat tidak bergerak maka situasinya menjadi lebih sulit. **(Lmg)-o**

ASET HINGGA KREDIT TETAP TUMBUH OJK DIY Nilai Kondisi Perbankan DIY Masih Aman

YOGYA (KR) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY menilai, indikator perbankan di DIY masih menunjukkan kondisi yang baik hingga triwulan II 2020. Selain itu, tingkat permodalan dan likuiditas perbankan di DIY pun masih dalam kondisi yang aman hingga saat ini.

"Jumlah aset, kredit/pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan DIY pada triwulan II 2020 masih tumbuh namun lebih rendah dari triwulan I 2020," ujar Kepala OJK DIY Parjiman kepada *KR* di Yogyakarta, Jumat (3/7).

Parjiman mengatakan, posisi aset perbankan di DIY sebesar Rp 81,01 triliun atau tumbuh 4,56 persen pada triwulan II 2020. Capaian aset perbankan DIY tersebut lebih rendah dari pertumbuhan triwulan I 2020 sebesar 7,32 persen. DPK perbankan di DIY sebesar Rp 69,25 triliun atau tumbuh 5,32 persen pada triwulan II 2020 yang lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 7,95 persen dengan nominal Rp 70,11 triliun.

"Kredit yang disalurkan perbankan di DIY kepada masyarakat sebesar Rp 45,36 triliun atau tumbuh 3,91 persen pada triwulan II 2020 yang lebih rendah dibanding triwulan I 2020 sebesar 6,77 persen dengan nilai nominal Rp 45,74 triliun," katanya.

Parjiman menyampaikan, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan yang beroperasi di wilayah DIY masih sehat yang mencapai

24,30 persen. Selanjutnya, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) perbankan DIY pada triwulan II sedikit meningkat dari 3,25 persen menjadi 3,33 persen.

"Likuiditas perbankan di DIY masih terjaga dengan Rasio Aset Likuid terhadap Non Core Deposit (AL/NCD) sebesar 111,56 persen dan rasio AL/DPK sebesar 29,9 persen. Rasio tersebut masih diatas jumlah tertentu (threshold) masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen," tandasnya.

Sebelumnya, OJK minta masyarakat waspada beredarnya informasi hoax di sosial media yang mengajak untuk melakukan penarikan dana di perbankan. OJK menegaskan informasi yang beredar tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar yang telah dilaporkan kepada Bareskrim Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk diusut dan ditindak sesuai ketentuan karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sedangkan tingkat permodalan dan likuiditas perbankan secara nasional masih dalam kondisi yang aman. Rasio kecukupan permodalan perbankan sebesar 22,16 persen atau masih di atas ketentuan per Mei 2020. Rasio alat likuid/ non-core deposit dan alat likuid/DPK terpantau pada level 123,2 persen dan 26,2 persen hingga 17 Juni 2020. Prosentase tersebut masih jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. **(Ira)-o**



KR-Istimewa

Jajaran pimpinan Generali Indonesia.

JAKARTA (KR) - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) terus bertumbuh atas kepercayaan para pemegang polis dan mitra bisnisnya. Sepanjang tahun 2019, Generali Indonesia mencatat laba sebelum pajak mencapai Rp 182 miliar atau tumbuh 25 persen (yoy) dari tahun sebelumnya. Selain itu, kesehatan finansial Generali dalam kondisi prima dengan rasio solvabilitas (RBC) mencapai 423 persen atau 3,5 kali lipat di atas ketentuan minimum dari pemerintah yakni 120 persen.

CEO Generali Indonesia Edy Tuhirman menjelaskan, pencapaian tahun 2019 ini menunjukkan ambisi Generali untuk terus memperkuat posisi di Indonesia. Hadirnya DNA Journal dan RoboARMS di tahun 2019 yang menjadi solusi bagi kesehatan nasabah dan optimalisasi otomatis pada produk unit link. "Di tengah kompetisi yang terus bergerak di industri asuransi jiwa saat ini, Generali terus melahirkan berbagai solusi inovatif yang belum pernah ada di industri dan memberikan nilai tambah (added value) bagi nasabah sesuai dengan dinamika kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi," terangnya di Jakarta, Jumat (3/7). **(Aha)-o**